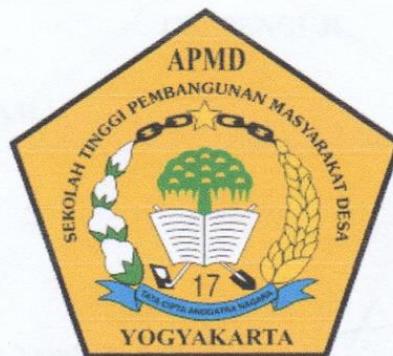


Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi

Di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

DJULIANTO

NIM 18520085

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Februari 2022

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Rijel Samaloisa

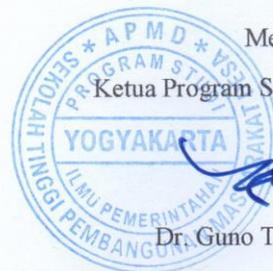
Ketua /Pembimbing

Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA

Penguji Samping I

Drs. Sumarjono, M.Si

Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djulianto
Nomor Mahasiswa : 18520085
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “***Governance dalam pengelolaan Desa Wisata Sambu***” ini benar- benar hasil karya sendiri. Hal- hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Februari 2021

Djulianto

MOTTO

وَجَدَّ جَدًّا مَنْ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkannya”

“Masa lalu tidak menentukan masa depan”

(Nanda, 2017)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirabil'alamin, dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan anugrah-NYA, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, adapun skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kepada orang tua saya bapak Surianto dan ibu saya Wiwik Purwanti.
Kedua orang tua saya yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan sepenuhnya serta selalu tidak henti-hentinya mendoakan saya di setiap perkuliahan saya sehingga penulisan karya ini selesai. Terimakasih kalian sungguh luar biasa. Saya sangat bangga dan bersyukur atas jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada saya.
2. Kepada saudara-saudariku Ike Purnamasari, Andika Pratama, Desiyana, Ayaesha Nurfadhila serta Iqbal Irfanza. Terima kasih atas dukungan berupa moril maupun materi selama berkuliah hingga menempuh gelar serjana.
3. Kepada keluarga besar Asrama mahasiswa sambas, terimakasih atas dukungan dan drama selama ini.
4. Kepada seseorang yang selalu membantu saya Clara yang selalu menemani saya dalam susah maupun senang.
5. Kepada teman-teman saya yang menemani perjalanan selama saya di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat penyertaan dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Governance* dalam pengelolaan desa wisata Di Dusun Sambu, Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademik, untuk mendapatkan titel akademik pada strata 1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun susunan bahasa. Oleh karena itu dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Bantuan berupa bimbingan saran, nasihat, serta dukungan moril maupun material sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa S.sos, MSi selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang baik dan sabar dalam membimbing serta memberikan saran-saran selama penulisan skripsi.
4. Bapak /Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan STPMD ”APMD” Yogyakarta
6. Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat Sambi di Kelurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu.

Demikian penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, maka peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 11 Febuari 2022

Djulianto
NIM: 18520085

INTISARI

Pengelolaan Desa wisata merupakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan melalui promosi desa yang menciptakan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan dan budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, menghargai keyakinan dan nilai-nilai tradisional. Keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Desa, tetapi juga dipengaruhi oleh Masyarakat setempat dan pihak Swasta yang diberi kewenangan untuk mengelolanya. Oleh sebab itu penulis menyusun skripsi dengan judul *governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi, Di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman dengan rumusan masalah bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata desa wisata sambi.

Jenis dan metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu dan atas dasar ciri-ciri tertentu. Subjek penelitian *governance* dalam pengelolaan desa wisata sambi adalah Aparatur pemerintah Kalurahan Pakembinangun, Masyarakat sambi, pengelola Ledok Sambi dan Sambi Resort. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data, dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan desa wisata sambi terdapat ketimpangan kolaborasi yang semu dan posisi tidak setara antar aktor dalam pengelolaan desa wisata sambi. Hal tersebut diketahui berdasarkan peran-peran aktor dan proses kolaborasi. Peran swasta sebagai aktor pemilik modal mendominasi pengelolaan destinasi wisata baik manajemen pengelolaan pariwisata maupun pengembangan atraksi dan akomodasi. Pemerintah belum banyak memainkan perannya selain sebagai pemilik lahan yang disewakan kepada pihak Ledok Sambi dan Sambi Resort untuk kegiatan pariwisata. Masyarakat dengan adanya kegiatan pariwisata di Desa Wisata Sambi, masyarakat berkontribusi dalam bentuk tenaga untuk mengelola atraksi pihak swasta sehingga masyarakat dapat menambah pendapatan. Proses *collaborative governance* menurut Ansell and Gash dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan Desa Wisata Sambi. Hal tersebut dipengaruhi oleh indikator *commitment to process*, dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata sambi tidak ada komitmen antara aktor, karena dalam pengelolaan desa wisata didominasi oleh pihak swasta berdasarkan hal tersebut komitmen ditentukan oleh pihak swasta sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang berorientasi pada profit.

(Kata Kunci: Governance, Pengelolaan, Desa Wisata)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu potensi yang menjadi pendukung dalam pengembangan sektor ekonomi di pedesaan adalah dengan mengelola dan memaksimalkan sektor pariwisata. Indonesia merupakan negara dengan objek wisata yang tersebar di berbagai daerah, bahkan tidak sedikit objek wisata yang terletak di pedesaan.

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. (Muliawan dalam Yuri, 2019: 37)

Pembangunan Pedesaan harus dikaitkan dengan prakarsa Pemerintah Desa bersama Masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa pasal 1 yang menegaskan bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat didasarkan atas prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. diakui dan dalam sistem Pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Desa Wisata memerlukan manajemen yang baik untuk pengembangan desa wisata tersebut. Manajemen yang dibutuhkan Desa Wisata

seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan, manajemen strategis, dan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh wisatawan, sehingga penyedia jasa dapat merumuskan dan merencanakan pemasaran produk dengan baik. Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pariwisata yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai produk destinasi kepada wisatawan. (Masitah, 2019:6)

Keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Desa, tetapi juga dipengaruhi oleh Masyarakat setempat dan pihak Swasta yang diberi kewenangan untuk mengelolanya. Interaksi Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta sejalan dengan salah satu dari lima fungsi pokok ilmu Pemerintahan. Fungsi utama Ilmu Pemerintahan adalah 5G, yaitu *Government, Governing, Governability, Governance, dan Governmentality*. Secara khusus hubungan kolaborasi dalam Pengelolaan merupakan bentuk *Governance* (G4), yaitu interaksi antara Negara-Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta.

Governance mengindikasikan “*disesiminasi otoritas*” dari *single actor* menjadi *multi-actor*. Dalam konsep *governance*, terdapat urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah sehingga dikelola bersama dengan beberapa stakeholder yaitu swasta dan masyarakat, sehingga dengan adanya *governance* peran pemerintah tidak lagi dominan sehingga menciptakan demokrasi dalam tata kelola Desa Wisata. (Ulum dan Ngindana dalam Ansar, 2018: 30).

Kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan terkait dalam Pengelolaan Desa Wisata sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan Pengelolaan Desa Wisata. Kerjasama dan koordinasi antar berbagai stakeholder dapat bervariasi, mulai dari informasi hingga bentuk kerjasama formal dan informal. Sementara itu, ruang lingkup kerjasama juga sangat luas, meliputi seluruh proses pembangunan Desa Wisata, mulai dari perencanaan seperti pelaksanaan kegiatan termasuk operasional, pemasaran hingga kegiatan monitoring sehingga target dapat dicapai secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat sekitar secara khusus.

Keterlibatan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kegiatan kepariwisataan yang beragam dan didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Berdasarkan undang-undang tersebut juga diketahui bahwa tujuan pengelolaan pariwisata terkait dengan bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Desa Wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu yang kemudian berpotensi untuk dikembangkan guna menarik pengunjung. Ciri khas Desa diolah dan dikemas lebih menarik untuk menjadi destinasi wisata. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang memiliki banyak Objek Wisata. Kabupaten ini memiliki potensi untuk dibangun Desa Wisata karena potensi alamnya yang besar. Gunung Merapi sebagai salah satu

gunung berapi aktif di Indonesia, hutan, sungai, dan berbagai tanaman khas seperti salak pondoh merupakan potensi di kabupaten ini. Ciri khas Desa dilengkapi dengan outbond, trekking, fasilitas kuliner, dan ditambah dengan berbagai budaya dan peninggalan sejarah

Desa Wisata di Kabupaten Sleman merupakan salah satu alternatif destinasi wisata yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Di Desa Wisata, pengunjung bisa mendapatkan kesegaran dan kenyamanan yang terpancar dari pemandangan alam yang indah. Pakembinangun adalah sebuah Kalurahan di Kabupaten Sleman, Kalurahan Pakembinangun terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Sleman. Jarak dari Kalurahan Pakembinangun ke pusat Pemerintahan Kabupaten Sleman adalah 14 km. Letak ibu Kalurahan Pakembinangun berada pada 77.66708' LS dan 110.42011' BT. Desa Pakembinangun memiliki luas 417,60 Ha. Desa ini dihuni oleh 2270 kepala keluarga. Jumlah penduduk Kalurahan Pakembinangun adalah 6620 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 3228 jiwa dan penduduk perempuan 3392 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.599,04 jiwa/km². (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2021)

Kalurahan Pakembinangun terletak di dataran tinggi, dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Kalurahan Pakembinangun memiliki iklim seperti daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan hawa sejuk sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kalurahan Pakembinangun adalah 32°C dengan suhu terendah 18°C. Kalurahan Pakembinangun terletak di lereng Gunung Merapi dan memiliki banyak potensi wisata, yang menjadikan sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran yang berkontribusi dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi. Di Kalurahan Pakembinangun Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani. Salah satu Desa Wisata yang sedang berkembang saat ini adalah Desa Wisata Sambi.

Desa Wisata Sambi merupakan Desa alam asli Jogja yang terletak di Jalan Kaliurang Km. 19.2 Padukuhan Sambi, Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, DIY. Desa Wisata Sambi memiliki berbagai potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Desa Wisata yang cukup dekat dengan Gunung Merapi ini menyuguhkan panorama alam yang sangat indah untuk dinikmati sehingga dapat memberikan kesegaran dan ketenangan pikiran, panorama alam persawahan dan pepohonan yang rindang serta air yang jernih serta rumah-rumah adat seperti joglo, limasan, simon, dengan halaman yang luas bisa digunakan media bermain sambil menikmati sejuknya udara dan suasana kampung alam asli jogja.

Sejarah terbentuknya Desa Wisata Sambi berawal dari kunjungan seorang budayawan sekaligus pemilik Lembaga Swadaya Masyarakat Ibu Suliyantoro yang melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang indah, serta sumber daya manusianya di Dusun Sambi yang belum sepenuhnya tereksplorasi.

Latar belakang terbentuknya Desa Wisata Sambi sebenarnya karena Ibu Suliyantoro melihat kurangnya keterampilan Masyarakat setempat dalam mendukung kegiatan pariwisata dikarenakan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, serta rendahnya kemampuan pengelolaan Desa Wisata. Kemudian Ibu Suliyantoro bersama lembaga sosial yang dipimpinnya mengajak Masyarakat untuk membangun

Dusun Sambu menjadi destinasi wisata alam di Yogyakarta yang kemudian diberi nama Desa Wisata Sambu.

Agar program tersebut dapat terlaksana, Ibu Suliyantoro membentuk kepengurusan yang berasal dari perangkat Desa setempat yang berguna untuk mendukung dan mengelola program Desa Wisata Sambu. Setelah terbentuk kepengurusan diadakan berbagai pelatihan untuk pemberdayaan Masyarakat Dusun Sambu, yaitu penyuluhan kesadaran wisata, pelatihan keterampilan, pelatihan seni budaya, pelatihan manajemen. Selain program pemberdayaan Masyarakat, LSM Suliyantoro juga memberikan bantuan keuangan dan bantuan manajemen. Produk yang ditawarkan oleh pengelola Desa Wisata Sambu adalah wisata alam dan budaya.

Setelah Masyarakat mengikuti program pemberdayaan dan mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengelolaan Desa Wisata Sambu diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Dusun Sambu. Pengelolaan Desa Wisata Sambu secara swadaya oleh Masyarakat sudah berlangsung beberapa tahun.

kemudian Event Organizer dari Jakarta bernama Gaia Solution dan Sambu Resort menawarkan kerjasama untuk mengembangkan Desa Wisata Sambu. Pengembangan dilakukan dengan menambah produk wisata yang ditawarkan yaitu Agility Games, Outbond, Camping Ground, Rumah Joglo & Homestay. Dengan adanya penambahan produk wisata Masyarakat dan pengelola dituntut untuk meningkatkan keterampilan dalam mendukung pengembangan pengelolaan Desa Wisata Sambu, untuk itu dilakukan pelatihan keterampilan lanjutan bagi Masyarakat dan pengelola.

Berdasarkan Sejarah Perkembangan pengelolaan Desa Wisata Sambi yang berawal dari kunjungan seorang Budayawan sekaligus pemilik Lembaga Swadaya Masyarakat Ibu Suliyantoro yang melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang indah, serta sumber daya manusianya di Dusun Sambi yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Secara tidak langsung Paradigma *Governance* yang melibatkan Pemerintah Desa, Masyarakat Sambi dan pihak Swasta (Gaia Solution dan Sambi Resort) terbentuk karena ketiga stakeholder ini berkolaborasi dalam mengelola dan memajukan Desa Wisata Sambi.

Ibu Suliyantoro bersama Pemerintah Desa membentuk kepengurusan yang berasal dari perangkat Desa setempat yang berguna untuk mendukung dan mengelola program pemberdayaan Masyarakat hingga Masyarakat dapat mengelola Desa Wisata Sambi. Setelah Program Pemberdayaan selesai pengelolaan Desa Wisata Sambi dilimpahkan kepada Masyarakat, tetapi Pemerintah Desa tetap memfasilitasi dan membuat kebijakan yang dibutuhkan dalam mendukung kemajuan Desa Wisata Sambi.

Masyarakat sendiri memiliki peran sebagai tuan rumah serta sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembang kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki baik itu berupa tradisi, budaya, dan alat. Masyarakat dalam kaitannya dengan hal ini juga dapat dijadikan sebagai pemberi ide/gagasan dalam rencana pengelolaan kepariwisataan juga bisa sebagai pengawasan dalam jalannya kegiatan Pengelolaan kepariwisataan dalam hal ini pengelolaan Desa Wisata Sambi agar tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ada di daerah Sambi tersebut.

Swasta disini memiliki peran sebagai pemilik modal dan jejaring yang dimilikinya untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai pengembang dan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan kepariwisataan dalam hal ini Ledok Sambi dan Sambi Resort.

Pengelolaan desa wisata sambi oleh masyarakat sambi, kurang kreatif dan inovatif dalam menciptakan daya tarik seperti wahana-wahana baru, mengakibatkan Desa Wisata sambi ditinggalkan pengunjung karena bosan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan kemampuan masyarakat dalam mengetahui manajemen pengelolaan desa wisata. Hingga datangnya pihak swasta yakni Ledok Sambi dan Sambi Resort yang berpengalaman dalam pengelolaan objek wisata membangkitkan kembali kegiatan pariwisata di desa wisata sambi, hal tersebutpun tentunya berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat sambi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kolaborasi swasta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sambi. Dalam mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah Kalurahan Pakembinangun, Ledok Sambi dan Sambi Resort dalam pengelolaan desa wisata sambi, Peneliti akan mendiskripsikan peran-peran aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Sambi dan interaksi antar stakeholder pengelola dideskripsikan melalui proses kolaborasi aktor menurut Ansell and Gash dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Kalurahan Pakembinangun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kolaborasi Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Kalurahan Pakembinangun?

C. Tujuan

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Peran aktor Pemerintah Kalurahan Pakembinangun, Masyarakat Sambi, Ledok Sambi dan Sambi Resort dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi Kalurahan Pakembinangun.
2. Mendeskripsikan Proses kolaborasi Pemerintah Kalurahan Pakembinangun, Masyarakat Sambi, Ledok Sambi dan Sambi Resort dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi Kalurahan Pakembinangun.

D. Manfaat

- a. Secara Teoritis, Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan memperluas pengetahuan serta pengalaman dibidang Ilmu Pemerintahan Desa
- b. Secara praktis, Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata agar lebih efektif.

E. Kerangka Konseptual

A. Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government ke arah governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society) maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut sumarto (2004:2) konsep *governance*, pemerintah menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

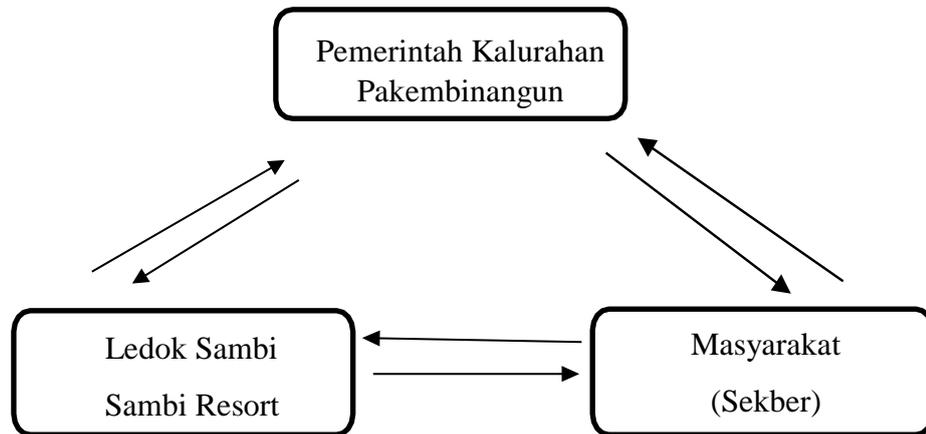
Menurut Rodhes (Dalam Yuri 2019: 29) istilah dalam konsep governance, yaitu pertama, governance sebagai Corporate Governance; proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil/mengimitasi prinsip-prinsip yang ada pada sektor pribadi, keterbukaan, informasi, integritas individu, akuntabilitas yang tinggi, dan peran yang lebih jelas. Kedua, governance sebagai the minimal state: struktur, ukuran, dan peran

pemerintah dirampingkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien dengan cara melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi, dan memotong dinas sipil yang dirasa hal tersebut kurang berfungsi.

Sedarmayanti (2003: 56) berpendapat bahwa istilah governance tidak hanya berarti pemerintah sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan dan pembinaan penyelenggaraan.

Sedarmayanti dalam bukunya juga mengungkapkan pendapatnya mengenai Governance. Berdasarkan aktor yang terlibat dibagi menjadi tiga bagian yaitu negara, Swasta, dan Masyarakat. Negara sendiri dalam hal ini sebagai suatu unsur dari governance yang didalamnya terdapat lembaga-lembaga sektor publik. Swasta merupakan bentuk dari perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor informal di pasar. Masyarakat yang terdiri dari kelompok atau individu yang melakukan interaksi secara politik, sosial, dan ekonomi, Masyarakat ini dapat dikategorikan sebagai lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan lainnya.

Bagan 1.1
Pola Hubungan Stakeholder dalam *Governance*
Pengelolaan Desa Wisata Sambu



Sumber: Observasi Penelitian (2021)

Hadirnya Negara/Pemerintah sejatinya memiliki peran sebagai fasilitator serta pembuat kebijakan atau peraturan dan melakukan kegiatan pengawasan dalam pembagunan kepariwisataan.

Masyarakat sendiri memiliki peran sebagai tuan rumah serta sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembang kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki baik itu berupa tradisi, budaya, dan alat. Masyarakat dalam kaitannya dengan hal ini juga dapat dijadikan sebagai pemberi ide/gagasan dalam rencana pengelolaan kepariwisataan juga bisa sebagai pengawasan dalam jalannya kegiatan Pengelolaan kepariwisataan dalam hal ini pengelolaan Desa Wisata Sambu agar tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ada di daerah Sambu tersebut.

Ledok Sambi dan Sambi Resort merupakan pihak swasta yang memiliki peran sebagai pemilik modal dan jejaring yang dimilikinya untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai pengembang dan atau sebagai pelaksana kegiatan pembangunan kepariwisataan dalam hal ini Swasta bisa terdiri sebagai perusahaan atau sebagai investor.

B. Collaborative Governance

Collaborative Governance muncul di era paradigma governance, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Charala, 2012: 264).

Menurut Holzer (2012: 349) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.

Menurut Ansell dan Gash (2007: 543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi

konsesus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Definisi dari Ansell dan Gash (2007: 5) menekankan enam kriteria. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsesus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2007: 544).

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran aktor tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah (Ansell dan Ansell, 2017: 172).

Collaborative governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011: 4), *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk

memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu

Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell, 2021: 178).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsensus melalui interaksi formal maupun informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama.

Proses *Collaborative Governance*

Mengenai proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi guna mengetahui proses kolaborasi dan interaksi antar aktor-aktor pengelola, maka penelitian menggunakan indikator yang di

ungkapkan oleh Ansell and Gash (2007:558 -561). Model ini dipakai karena model *collaborative governance* dibuat dengan mengkaji 137 kasus *Collaborative Governance* yang melingkupi berbagai sektor kebijakan serta dengan model inilah banyak *Collaborative Governance* yang mencapai kesuksesan. Ansell and Gash membagi proses relasi ke dalam beberapa proses kolaborasi, yaitu *face to face dialogue*, *commitment to process*, *trust building*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*.

a. Pertemuan Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Face to Face Dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang bersamaan, sehingga terjadi sebuah dialog secara langsung atau interaktif antara pihak satu dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk membahas suatu kepentingan bersama. Proses ini menjadi penting untuk mengawali sebuah *collaborative governance* atau dengan kata lain tanpa adanya pertemuan atau tatap muka maka *collaborative governance* tidak akan berlangsung.

b. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Commitment to Process merupakan merupakan suatu komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan oleh semua pihak. Saling berbagi komitmen, berarti pihak yang terkait saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan serta solusi. Perlu ditekankan bahwa proses ini merupakan milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama.

c. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan bahwa para pihak terkait memang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil suatu kebijakan yang terbaik untuk semua pihak. Trust Building dimulai dengan membangun komunikasi yang baik antar berbagai pihak yang terlibat khususnya dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambu. Dalam hal ini aktor-aktor dalam berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor-aktor kolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan

d. Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Share Understanding merupakan saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa misi dari forum ini merupakan tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar mempunyai pemahaman yang sama mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dari proses ini. Saling berbagi pemahaman juga dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Intermediate Outcomes merupakan hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberikan nilai manfaat dan bernilai strategis.

Dari kelima proses tersebut antara satu proses satu dengan proses lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu proses tidak ada atau tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa model *Collaborative Governance* Ansell and Gash tidak berhasil.

C. Pengelolaan Desa Wisata

Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. Misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. (Priasukmana & Mulyadin, 2001)

Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratanantara lain sebagai berikut (Priasukmana dan Mulyadin, 2001):

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.

- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo (2021:3), Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, arsitektur tradisional, struktur ruang Desa yang disajikan dalam bentuk integrasi budaya. komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung

Menurut Itah Masitah (2019:6) Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal.

Dari beberapa defenisi Desa Wisata diatas dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal yang dapat dikelola menjadi pendukung dalam pengembangan sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di pedesaan. Pengelolaan Desa Wisata memerlukan manajemen yang baik untuk

pengembangan desa wisata tersebut. Manajemen yang dibutuhkan Desa Wisata seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan, manajemen strategis, dan manajemen pemasaran

Soewarno (2012:20), menyebutkan secara umum pengelolaan ialah sebagai satu kegiatan, seni, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi, lembaga, dan organisasi dilakukan dengan tujuan dan maksud pengerjaan terhadap prinsip-prinsip yang mengarah pada arah perbaikan menjadi lebih baik lagi.

Manajemen atau pengelolaan menurut Hasiuan dalam Torang (2013:165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Miller dalam buku Torang (2013: 166) menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Terkait pengelolaan Desa wisata, Sumarto (Dalam Shintani 2020: 30) mengidentifikasi dalam tiga (3) aktor penting, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata.

Menurut Shintani (2020: 29), fasilitator diartikan sebagai pihak yang menyediakan fasilitas baik berupa bantuan fisik, penyediaan jasa dan sebagainya. Guna melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan maka fasilitas wisata sangat diperlukan.

Adapun tujuannya agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang positif dari tempat wisata tersebut.

b. Swasta sebagai penyedia dan penyelenggara jasa

Jasa yang ditawarkan oleh Swasta biasanya jasa yang memang dibutuhkan para wisatawan selama mereka berada di daerah wisata salah satunya adalah akomodasi (Shintani, 2020: 31). Akomodasi wisata merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang berwisata, bentuk akomodasi yang dibutuhkan wisatawan yaitu di antaranya adanya tempat untuk menginap saat mereka melakukan perjalanan wisata.

c. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata.

Menurut Shintani (2020: 31), peran aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Keaktifan tersebut berupa secara sadar ikut membantu program Pemerintah dengan inisiatif dan kreasi, mau melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan pariwisata atau melalui keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan Masyarakataat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini guna membatasi masalah agar peneliti dapat fokus terhadap obyek penelitiannya maka peneliti membatasi apa yang akan diteliti, dengan ruang lingkup penelitian:

- Mendeskripsikan Peran Aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Sambi yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

- Mendeskripsikan Proses Kolaborasi antara Stageholder dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Deskriptif, sesuai dengan tema yang kami angkat yang mana peneliti lebih cocok apabila menggunakan penelitian deskriptif yang mampu menggambarkan peristiwa dan menjawab rumusan masalah. Morison (2012:166) menerangkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif menuntut peneliti untuk menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang ada saat ini.

Sedangkan pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:347) mengenai penelitian kualitatif yang berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

2. Unit Analisis

a. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2013: 89–90) subyek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat benda, proses, kegiatan, dan tempat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian saya adalah Pemerintah Kalurahan Pakembinangun, masyarakat Sambi (Sekber), Ledok Sambi dan Sambi Resort.

b. Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2009: 20) adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karna penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek pada penelitian ini ialah tentang Governance Pengelolaan Desa Wisata Sambu di Dusun Sambu, Kalurahan Pakembinangun.

c. Lokasi Penelitian

Dusun Sambu, Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen terkait data di internet, video dan audio. Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti memilih narasumber berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan data yang memang dibutuhkan. Terkait penelitian kualitatif narasumber atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Menurut Morris (dalam Hasanah, 2017: 27), observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain, lebih lengkapnya observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Sedangkan observasi partisipan sendiri lebih kepada orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi (Hasanah, 2017: 36). Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati kondisi awal di lokasi penelitian. Data observasi pendahuluan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan latar belakang. Observasi juga dilakukan untuk melihat kondisi terkini di lokasi penelitian, yaitu Desa Wisata Sambi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian, metode ini dilakukan karena dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui, yang kedua hal-hal yang ditanyakan dapat mencakup hal bisa bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau masa kini dan masa yang akan datang. Untuk penelitian ini akan menanyakan secara lengkap tentang perubahan kondisi sosial, keterbukaan ini diharapkan mampu memberikan kelengkapan data yang lebih mendukung dan akurat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Nilamsari, 2021) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya (Nilamsari, 2021: 179). Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis yang dimaksud adalah dapat berupa jurnal, buku dan laporan yang dianggap relevan dengan topik penelitian dengan melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan penelitian serta membantu peneliti mengelola dan menarik kesimpulan dari studi kepustakaan.

Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen yang tertera pada laman website Sleman.unimus.ac.id untuk data gambaran umum Desa Wisata Sambi.

4. Teknik Analisis Data

a. Penyajian Data

Setelah melewati reduksi data, kemudian data akan ditampilkan, penyajian data secara tekstual (naratif) atau dapat juga berupa tabel, grafik, diagram dan sejenisnya. Dengan adanya proses penampilan data ini akan lebih mudah dalam hal memahami data.

b. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2013) Teknik analisis data yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari jawaban pokok, mencari tema, dan pola, kemudian memfokuskan pada hal yang dianggap penting. Data yang telah direduksi akan mempermudah dalam pengumpulan karena data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Data yang akan kami reduksi nanti dari hasil penerlitan dan beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan untuk mencari jawaban pokok kemudian yang akan menjadi hal yang dianggap penting berhubungan dengan topik bahasan serta menjawab dari rumusan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan penyajian data. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sehingga dengan adanya penarikan kesimpulan maka akan terjawablah apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Dari rangkaian kegiatan penelitian yang dilaksanakan akan nampak apa yang menjadi inti sari dari penelitian ini.

BAB II

DESKRIPSI DESA WISATA SAMBI

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Umum Dusun Sambu

Dusun Sambu berada di wilayah Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Secara geografis Dusun Sambu dibatasi oleh Dusun Purwodadi sebelah utara, Desa Balong di sebelah selatan, dusun purwodadi sebelah barat, dan Desa Wukirsari di sebelah timur. Sedangkan luas Dusun Sambu adalah 31,16 Ha. Data monografi menunjukkan bahwa Dusun Sambu terletak 550 m Ketinggian Tanah dari permukaan laut, dengan banyaknya curah hujan 4000 mm, dan topografi (dataran rendah, tinggi, gunung) berupa dataran tinggi dan lereng gunung, serta Suhu udara (rata-rata) 28 °C. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa) Dusun Sambu antara lain jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 3,5 km, jarak dari ibukota kabupaten 30 km, dan jarak dari ibukota Provinsi 45 km..

Keadaan demografi suatu wilayah yang merupakan suatu faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu manusia merupakan obyek dan subyek dalam pembangunan, ini dalam artian manusia sebagai sasaran pembangunan dan sekaligus merupakan pelaku pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, berikut rincian jumlah penduduk menurut

beberapa kategori:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Dusun Sambu Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	134
2.	Perempuan	147
	Jumlah	281

Sumber: Data Monografi Dusun Sambu, 2021

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penduduk Dusun Sambu yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu 134 jiwa dan 147 jiwa merupakan Perempuan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Dusun Sambu Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	214
2.	Khatolik	17
3.	Kristen	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	231

Sumber: Data Monografi Dusun Sambu, 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Dusun Sambu beragama Islam, yaitu berjumlah 214 jiwa dan yang beragama Khatolik berjumlah 17 jiwa.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Dusun Sambi Menurut Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa
1.	00-03 Tahun	40
2.	04-06 Tahun	9
3.	07-12 Tahun	18
4.	13-15 Tahun	15
5.	16-18 Tahun	13
6.	18 Tahun ke atas	186
	Jumlah	281

Sumber: Data Monografi Dusun Sambi, 2021

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak pada kelompok pendidikan di usia 18 tahun keatas yang berjumlah 186 jiwa. Sedangkan paling sedikit pada kelompok pendidikan berusia 04-06 tahun yang berjumlah 9 jiwa.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Dusun Sambi Menurut Kelompok Pendidikan

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum sekolah	13
2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	1
3.	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	3
4.	Tamat SD/ sederajat	7
5.	SLTP/ sederajat	15
6.	SMA/ sederajat	26
7.	D-1	1
8.	D-2	1
9.	D-3	3
10.	S-1	14
11.	S-2	1
	Jumlah	85

Sumber: Data Monografi Dusun Sambi, 2021

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa angkatan kelompok pendidikan terbanyak adalah lulusan SMA/ sederajat yaitu 26 orang. Sedangkan paling sedikit adalah angkatan kelompok pendidikan tidak pernah sekolah, D-1, D-2, dan S-2 yang berjumlah masing-masing 1 jiwa

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Dusun Sambu Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Petani	19
2.	Buruh tani	6
3.	Buruh/swasta	15
4.	Pegawai negeri	17
5.	Pedagang	4
6.	Peternak	12
7.	Montir	2
	Jumlah	75

Sumber: Data Monografi Dusun Sambu, 2021

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat mata pencaharian penduduk dusun Sambu mayoritas adalah petani dengan jumlah 19 orang. Sedangkan mata pencaharian pegawai negeri dan buruh swasta pada urutan selanjutnya yaitu dengan jumlah 17 orang dan 15 orang, dan yang paling sedikit adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai montir yaitu 2 orang.

Dusun Sambu merupakan dusun yang terletak di Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Akses menuju ke desa tersebut lebih mudah melalui jalan Kaliurang. Dusun Sambu memiliki potensi alam yang bagus yaitu panorama desa, pertanian,

peternakan, rumah penduduk, kesenian dan kebudayaan.

2. Deskripsi Desa Wisata Sambu

Desa Wisata Sambu adalah merupakan desa alami asli Jogja, yang terletak di jalan Kaliurang Km. 19,2 Padukuhan Sambu desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY. Desa Wisata Sambu memiliki beragam potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Desa wisata yang berada cukup dekat dengan Gunung Merapi ini, menghadirkan panorama alam yang sangat indah untuk dinikmati sehingga dapat memberikan kesegaran dan ketentraman hati, panorama alam pesawahan dan pepohonan yang rindang serta kejernihan airnya juga rumah-rumah adat seperti joglo, limasan, simon, dengan halaman yang luas, bisa dipakai media bermain sambil menikmati sejuknya udara serta suasana desa alami asli Jogja.

3. Sejarah Desa Wisata Sambu

Sejarah terbentuknya Desa Wisata Sambu berawal dari kunjungan seorang budayawan sekaligus pemilik Lembaga Swadaya Masyarakat Ibu Suliyantoro, beliau melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang indah, serta sumber daya manusia Dusun Sambu yang belum tergali secara maksimal. Latar belakang pembentukan Desa Wisata Sambu adalah kurangnya ketrampilan masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata, kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesadaran

masyarakat akan wisata, dan kemampuan pengelolaan desa wisata yang rendah. Kemudian Ibu Suliyantoro bersama Lembaga Sosial masyarakat yang dipimpinnya mengajak masyarakat untuk membangun Dusun Sambi menjadi sebuah tujuan wisata alam di Yogyakarta yang kemudian diberi nama Desa Wisata Sambi pada tahun 2002.

Agar terlaksananya program tersebut dibentuk kepengurusan yang berasal dari perangkat pemerintahan Dusun Sambi, untuk mendukung program Desa Wisata Sambi diadakan berbagai pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat Dusun Sambi yaitu penyuluhan sadar wisata, pelatihan ketrampilan, pelatihan seni dan budaya, pelatihan pengelolaan. Selain program pemberdayaan masyarakat, LSM Suliyantoro juga memberikan bantuan dana dan pendampingan pengelolaan.

Potensi Dusun Sambi yang dijadikan produk wisata oleh pengelola Desa Wisata Sambi adalah

- a. Wisata alam
 - 1) Pemandangan gunung Merapi
 - 2) Sungai Kuning
 - 3) Alam pedesaan Sambi
 - 4) Alam persawahan Sambi
 - 5) Wisata *lava tour*
 - 6) Wisata kebun buah naga
- b. Wisata seni dan budaya

- 1) Rumah joglo dan limasan milik penduduk
- 2) Kesenian wayang kulit
- 3) Kesenian karawitan
- 4) Adat sadranan, wiwitan, dan upacara mertu dusun
- 5) Belajar membatik, merangkai janur, karawitan

c. Wisata *outbound*

- 1) *Camping* dan *gathering*
- 2) Permainan kognitif dan afektif
- 3) Perah susu sapi
- 4) Tanam dan petik padi
- 5) Tangkap ikan
- 6) Bajak sawah

Setelah masyarakat mengikuti program pemberdayaan dan mengalami peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, pengelolaan Desa Wisata Sambi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dusun Sambi pada tahun 2004.

Pengelolaan Desa Wisata Sambi secara mandiri oleh masyarakat berjalan selama 4 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dengan kepengurusan yang disebut BPDWS (Badan Pengurus Desa Wisata Sambi). Sampai kemudian sebuah *Event Organizer* dari Jakarta bernama Gaia Solution menawarkan kerjasama untuk mengembangkan Desa Wisata Sambi pada tahun 2008 yang diberi nama Ledok Sambi. Selain

Ledok Sambi yang menjalin kerjasama dengan pengelola Desa Wisata Sambi, ada pihak swasta yang menjalin kerjasama dengan menyediakan penginapan berkelas atas untuk wisatawan yaitu Sambi Resort.

4. Tujuan Desa Wisata Sambi

Tujuan pembentukan Desa Wisata Sambi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, dan mendorong terwujudnya Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, Keramahtamahan dan kenangan).

5. Kepengurusan Desa Wisata Sambi

Kepengurusan Desa Wisata Sambi dari awal berdirinya pada tahun 2002 sampai sekarang mengalami 3 bentuk kepengurusan yaitu:

a. Pemerintah Dusun Sambi dan LSM Suliyantoro

Kepengurusan dipegang oleh perangkat pemerintahan Dusun Sambi yang didampingi oleh LSM Suliyantoro, berlangsung pada tahun 2002 sampai tahun 2004.

b. BPDWS (Badan Pengurus Desa Wisata Sambi)

Kepengurusan BPDWS ini merupakan bentuk perubahan kepengurusan dari pemerintah Dusun Sambi yang didampingi LSM Suliyantoro ke masyarakat secara mandiri. Kepengurusan ini berlangsung dari tahun 2004-2008.

c. SEKBER (Sekretariat Bersama)

Pada tahun 2008 kepengurusan Desa Wisata Sambi menjalin kerjasama dengan *Event Organizer Gaia Solution* (Ledok Sambi) dan Sambi Resort. Dengan adanya kerjasama ini maka kepengurusan berganti dari BPDWS ke SEKBER mulai tahun 2008 sampai sekarang.

6. Sarana Prasarana

- a. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Desa Wisata Sambi, meliputi:
 - b. Gedung sekretariat dengan hak tanah milik ketua pengurus
 - c. Transportasi berupa 2 mobil pick up, 3 motor
 - d. Perlengkapan aktivitas wisata, meliputi: 2 *megaphone*, 4 meja makan, 100 kursi, 3 *Handy Talky*, 12 tenda kecil, 4 tenda besar, 25 kasur dan bantal, 20 tikar, 12 paket alat membatik, 45 perlengkapan keamanan *outbond*, seperangkat karawitan dan wayang kulit. 25 toilet
 - e. Mushola
 - f. Lahan perkemahan, 20 *homestay*
 - g. Papan pengumuman
 - h. Laptop, printer, modem
 - i. Papan nama, papan petunjuk jalan
 - j. Penerangan/ listrik

k. Tempat parkir yang cukup luas

l. Balai pertemuan

7. Jaringan Kerja Sama

Desa Wisata Sambu dalam menjalankan kegiatan tentu tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain yang memiliki *concern* dan kepedulian terhadap perkembangan sektor pariwisata di daerah Desa Wisata Sambu. Selama ini masyarakat dan pemerintah pakembinangun menjalin kerja sama dengan *Event Organizer* Gaia Solutio (Ledok Sambu) dan Sambu Resort.

Bentuk kerjasama yang dijalin antara Desa Wisata Sambu, Ledok Sambu, dan Sambu Resort bersifat saling melengkapi satu sama lain. Bentuk kerjasama yang saling melengkapi dapat dilihat dari penyediaan jenis penginapan bagi wisatawan yaitu perkemahan yang disediakan oleh Ledok Sambu, *homestay* yang disediakan oleh Desa Wisata Sambu dan hotel yang disediakan oleh Sambu Resort. Selain bentuk kerjasama dalam jenis penginapan, Desa Wisata Sambu dan Ledok Sambu saling melengkapi dalam produk wisata yaitu Desa Wisata Sambu menawarkan wisata alam dan budaya, sedangkan Ledok Sambu menawarkan wisata *outbond*.

Daftar Pustaka

- Anshar, M. Y. (2018). “Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.” (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Arikunto, S., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chris Ansell and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkley: University of Chariantoomia.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kabupaten Sleman Dalam Angka / Sleman Regency InFigures*. Yogyakarta: BPS.
- Hasanah, H. 2017. *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taqaddum. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Ilyas. 2016. Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education*, 2(1).
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nilamsari, N. 2021. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Wacana.

- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung; Mandar Maju.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- imam, Taofik Chaerul. 2017. *Relasi Intraorganisasi Pemerintah Kota Batu dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar maju.
- Shintani, A. 2020. Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Sei. Gohong. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9, 28–37
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 Tentang Desa
- Yuri Aditya, Ginung. 2019. *Relasi Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.